



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WIDYATMOKO
2. Jabatan : SEKRETARIS DIREKTUR
3. NHK : 635135

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.578.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
2. Tanah Seluas 246 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 698.000.000
4. Tanah Seluas 178 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **224.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 137.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI I10 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI ER6 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOTOR, YAMAHA YUPITER MX 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000



6. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 62.200.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 30.826.788

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.895.026.788

III. HUTANG

Rp. 142.034.340

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.752.992.448

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.